

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DISTRIBUSI DANA  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**  
(Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung  
Kabupaten Lampung Selatan)

**Skripsi**

**Oleh:**  
**FITRIYANA NURMILA SARI**  
**NPM :1721030216**



**Program Study : Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DISTRIBUSI DANA  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**  
(Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung  
Kabupaten Lampung Selatan)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana SI  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**FITRIYANA NURMILA S  
NPM : 1721030216**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.  
Pembimbing II: Sucipto, S.Ag. M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

## ABSTRAK

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Bahwa dijelaskan bantuan Program Keluarga Harapan hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Namun pada kenyataannya bantuan Program Keluarga Harapan juga diberikan kepada masyarakat yang mampu atau kaya. Dan juga dana bantuan PKH tersebut oleh masyarakat disalahgunakan. Oleh sebab itu, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan PKH. Sedangkan dalam Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang dapat didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Apabila terjadi ketidakadilan dan ketidakmerataan distribusi kekayaan, maka akan timbul konflik antara masyarakat dan akan menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana distribusi dana menurut pandangan hukum Islam tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana sistem distribusi dana menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode random sampling, yakni 10% dari objek penelitian atau populasi. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi dan pengumpulan data sekunder.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Desa Karang Anyar distribusinya tidak tepat sasaran dikarenakan data PKH

menggunakan data yang lama. Ditinjau dari Hukum Islam bahwa distribusi dana PKH tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam distribusi Islam karena masih adanya masyarakat yang tergolong mampu mendapatkan bantuan PKH tersebut. Distribusi dana PKH penyaluran dananya melalui rekening peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), besar bantuan yang diberikan komponen PKH berbeda-beda. Bantuan dana PKH disalurkan dalam 1 tahun dalam 3 bulan atau 4 bulan, penyaluran bantuan PKH tersebut hanya diberikan kepada masyarakat miskin saja. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyaluran bantuan PKH, dimana masih adanya masyarakat yang tergolong mampu juga mendapatkan bantuan tersebut, berarti penyaluran bantuan PKH tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriyana Nurmila S  
NPM : 1721030216  
Jurusan : Hukum Ekonomi (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DISTRIBUSI DANA PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**” (Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2021  
Penulis,

Fitriyana Nurmila Sari





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:**

**Nama : FITRIYANA NURMILA SARI**  
**NPM : 1721030216**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Jurusan : Muamalah**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.**  
**NIP. 197304142000032002**

**Pembimbing II**

**Sucipto, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 196612271995031001**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).”**, Disusun oleh **Fitriyana Nurmila Sari, Npm 1721030216**, Program Studi **Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I**

(.....)

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I**

(.....)

**Penguji I : Dr. H. A. Kumedi Ja'ar, S.Ag. M.H**

(.....)

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

(.....)

**Penguji III : Sucipto, S.Ag.,M.Ag.**

(.....)



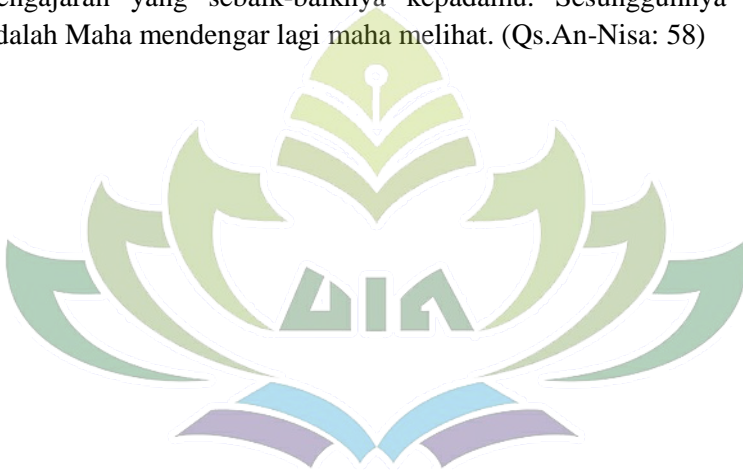
**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP.196210221993031002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat. (Qs.An-Nisa: 58)





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya di hari akhir. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

1. Kedua orang tuaku yaitu Bapak Sangat Riyadi dan Ibu Ngatinem, yang telah memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang diberikan. Semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakak-kakaku yang senantiasa memotivasi agar terselsaikannya skripsi ini dan selalu mendukung untuk masa depanku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Fitriyana Nurmila Sari, dilahirkan di Karang Anyar pada tanggal 07 Januari 1999, anak kedua dari pasangan Bapak Sangat Riyadi dan Ibu Ngatinem. Pendidikan dimulai dari SDN 1 Karang Anyar Kecamatan Jati Agung dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 20 Bandar Lampung dan lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan di SMA AL-HUDA Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DISTRIBUSI DANA PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)”** (Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Terselsaikkannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi dan uluran tangan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul, M.S.I. selaku sekretaris jurusan muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.I selaku pembimbing I dan Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan fikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan demi selsainya penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, Pegawai Fakultas Syari'ah, dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu dan membimbing selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kedua orang tuaku, Kakak-kakaku, terimakasih untuk doa, dukungan dan motivasi yang terus menerus agar cepat terselsaikkannya skripsi ini.
7. Kawan seperjuangan Mahasiswa Jurusan Muamalah angkatan 2017 yang telah berjuang bersama untuk mewujudkan suatu cita-cita yang diinginkan.

8. Sahabat-sahabatku Agung, Beta Ayun, Maya, Oca, Wina Sonia, Fhidiya, Siska, Putria, Yeyen, Fahmi. Hani, Yoga yang selalu mengulurkan tangan dalam membantu penulisan skripsi, dan selalu memberi support satu sama lain.
9. Untuk Sahabat SMA ku, Arum, Iin, Pau-pau, Suminah, Susi yang telah memberikan doa', dorongan, dan bantuan.
10. Untuk kawan berbagi sedih dan tawa, Ulan, Agung, Beta Ayun, Wina Sonia, dan Putria.
11. Teman-teman KKN-DR Kelompok 125 yang telah menemani suka dan duka, dan belajar bersama tentang banyak hal lainnya selama 40 hari.
12. Kepada Seluruh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Jati Agung yang telah bersedia diwawancara untuk dimintai pandangan mengenai masalah yang diteliti.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung. Semoga atas bantuan semua pihak Allah Swt berkenan memberikan balasan atas kebaikan mereka.

Bandar Lampung, 22 Desember 2020  
Penulis

**Fitriyana Nurmila S.**  
**1721030216**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikasi.....	11
H. Kajian Penelitian.....	11
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Distribusi	
1. Penegrtian Distribusi .....	21
2. Tujuan Distribusi .....	29
3. Kriteria Distribusi .....	32
4. Prinsip-prinsip Distribusi.....	32
B. Program Keluarga Harapan (PKH)	
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH).....	36
2. Hak dan Kewajiban Peserta PKH .....	36
3. Tujuan PKH.....	37
4. Kriteria PKH.....	38

5. Mekanisme Pelaksanaan PKH .....	40
6. Mekanisme Penyaluran PKH .....	40
7. Kelembagaan PKH .....	41
8. Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH .....	41
9. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH .....	42
10. Pemuktahiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH .....	43

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

A. Gambaran Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	
1. Sejarah Singkat Desa Karang Anyar .....	45
2. Visi Dan Misi Desa Karang Anyar .....	46
3. Letak Geografis Desa Karang Anyar .....	46
4. Keadaan Demografis Desa Karang Anyar .....	47
B. Profil Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan .....	50
C. Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan .....	54

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan .....	61
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan .....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Rekomendasi .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul adalah langkah awal untuk membuat atau memulai menulis skripsi ini, penulis berupaya agar skripsi ini dapat digunakan tepat dan tersampaikan kepada khalayak ramai. Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH)”** (Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi terkait dengan judul antara lain :

1. Tinjauan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata Tinjau yang berarti hasil meninjau, pandangan dan pendapat.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum yang mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.<sup>2</sup> Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.
3. Distribusi merupakan penyaluran dari harta yang ada baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.<sup>3</sup>
4. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 189.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2011), h. 67.

<sup>3</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam “Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi”* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 131.

Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis dalam memilih judul ini antara lain :

### **1. Alasan Obyektif**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Keluarga Harapan bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

### **2. Alasan Subjektif**

Ditinjau dari segi bahasa judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara berkembang dan berada di peringkat ke 4 negara yang berkependudukan terbanyak di dunia. Lagi-lagi Indonesia mengalami masalah krisis ekonomi yang menyebabkan keluarga miskin. Penyebab terjadinya keluarga

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 (ayat 1).



miskin, terdapat beberapa faktor internal yang ada pada keluarga miskin antara lain : rendahnya pendidikan, rendahnya keterampilan mereka, rendahnya motivasi hidup mereka, rendahnya kemauan untuk mengembangkan diri dan rendahnya informasi.<sup>5</sup>

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di Negara Berkembang.<sup>6</sup>

Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, maka pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan yaitu salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>7</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dan mengurangi beban pengeluaran dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.<sup>8</sup> Sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki

---

<sup>5</sup>Oos M. Anvas, *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 84.

<sup>6</sup>Hermanita, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.105.

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 (ayat 1).

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 2.

komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.<sup>9</sup> Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai 3 komponen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

**Tabel 1**  
**Komponen PKH**

<b>Komponen</b>	<b>Kategori</b>
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Hamil / Nifas</li> <li>2. Anak Usia 0-6 tahun</li> </ol>
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SD / Sederajat</li> <li>2. SMP / Sederajat</li> <li>3. SMA / Sederajat</li> </ol>
Kesejahteraan Sosial (Kesos)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjut Usia 60 Tahun Keatas</li> <li>2. Disabilitas Berat</li> </ol>

Sumber: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018  
tentang PKH

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa calon peserta PKH harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Sosial. Dengan menggunakan data masyarakat miskin dari hasil pendataan rumah tangga miskin yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), kemudian data tersebut diolah dan diseleksi oleh pusat guna memperoleh calon peserta PKH.

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah waktu, tempat dan

---

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 3.

pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang.

Konsep Ekonomi Islam didasarkan tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan pertanggungjawaban. Adapun pertanggungjawaban memiliki arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang ditetapkannya. Ekonomi Islam tampaknya masih terus dalam proses membentuk diri secara mandiri sebagai disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari gagasan Ekonomi Islam yang dikembangkan saat ini mempunyai dampak langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat muslim sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat hidupnya dalam menghilangkan persoalan keterbelakangan yang terjadi kepada masyarakat. Ekonomi Islam diharapkan dapat menetapkan tata dunia baru yang adil dan tidak bersifat hegomonistik, juga dapat membuat sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata pada setiap tingkatan.<sup>10</sup>

Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Karena tanpa pembagian kepada yang berhak menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak menerima itu. Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang diatur dalam ajaran Islam. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dan ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>H. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 131.

<sup>11</sup>Idri, *Hadis Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi* (Depok: Kencana, Edisi Pertama, 2015), h.130.

Menolong orang miskin akan mudah memperoleh rezki dari pertolongan Allah, serta akan mudah mendapatkan barokah doa mereka. Dengan menolong orang-orang miskin dan lemah kita akan memperoleh rezeki dan pertolongan dari Allah SWT. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ  
مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya : Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil saja dari kamu dan kamu harus (masih menjadi) pembengkok. (Q.S. Al-Baqarah: 83)

Ayat di atas menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam harus berbuat baik dan saling tolong menolong kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta kita juga harus bertutur baik kepada manusia.

Besar bantuan PKH pada setiap komponen berbeda-beda. Besar bantuan untuk setiap KPM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2**  
**Besar Bantuan Komponen PKH**

No	Kategori	Indeks Bantuan
1.	Ibu Hamil	Rp.2.400.00
2.	Anak Usia Dini	Rp.2.400.000
3.	SD / Sederajat	Rp.900.000
4.	SMP / Sederajat	Rp.1.500.000
5.	SMA / Sederajat	RP.2.000.000
6.	Disabilitas Berat	Rp.2.400.000
7.	Lanjut Usia	RP.2.400.000

Sumber: PKH Kecamatan Jati Agung

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besar bantuan setiap komponen berbeda-beda. Jumlah bantuan di atas merupakan jumlah bantuan untuk 1 tahun yang diberikan dalam 3 bulan sekali atau 4 kali dalam 1 tahun. Bantuan maksimum yang diberikan 4 komponen kategori tertinggi atau dengan bantuan maksimum pertahap 3 bulan sekali dalam 1 tahun sebesar Rp.2.400.000. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Dana bantuan Non Tunai dibayarkan kepada peserta PKH melalui rekening bank pengurus peserta PKH pada Lembaga Pembayar dan diambil langsung oleh Peserta PKH.<sup>12</sup>

Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah-tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup peraturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun unsur-unsur individu masyarakat

---

<sup>12</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 40.

serta anggota perserikatan maupun distribusi dalam sistem jaminan nasional.

Konsep Ekonomi Islam didasarkan tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan pertanggungjawaban. Adapun pertanggungjawaban memiliki arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang ditetapkannya. Ekonomi Islam tampaknya masih terus dalam proses membentuk diri secara mandiri sebagai disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari gagasan Ekonomi Islam yang dikembangkan saat ini mempunyai dampak langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat muslim sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat hidupnya dalam menghilangkan persoalan keterbelakangan yang terjadi kepada masyarakat. Ekonomi Islam diharapkan dapat menetapkan tata dunia baru yang adil dan tidak bersifat hegemonistik, juga dapat membuat sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata pada setiap tingkatan.

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan. Tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja memiliki semua yang apa dia suka, dan menggunakan cara apa saja yang mereka kehendaki. Kekayaan adalah sesuatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika pendistribusiannya itu tidak tepat maka sebagian kekayaan akan beredar di antara orang-orang kaya saja. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat. Seperti yang diumpamakan Afzalur Rahman, jika sesuatu negara mempunyai kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan kepada keadilan dan kebenaran maka negara itu belum dianggap berhasil.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Afzalur Rahman, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Darma Bakti, 1985), h. 92.

Masalahnya adalah masih adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan PKH tersebut, sedangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa yang berhak menerima bantuan tersebut yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau keluarga yang miskin saja. Seperti kasus di Desa Karang Anyar masih adanya keluarga yang mampu mendapatkan bantuan tersebut.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH di Desa Karang Anyar tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) hanya mendapatkan data-data peserta dari atasan yang telah melakukan survey sebelumnya. Sehingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mengetahui tentang ketidaktepatan sasaran tersebut. Dari ketidaktepatan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menyisir melakukan survey ulang dengan memberikan syarat-syarat masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar. Syarat *pertama*, termasuk Rumah Tangga Miskin (RTM). *Kedua*, termasuk dalam komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Islam menjelaskan bahwa tidak boleh di antara sesama saling memakan harta dengan jalan yang batil dan dalam Ekonomi Islam dijelaskan adanya prinsip distribusi yaitu salah satunya prinsip pemerataan dan keadilan. Pemerataan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi.<sup>14</sup> Tujuan terpenting dalam distribusi adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat sehingga kesamaan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena distribusi yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 141.

<sup>15</sup>*Ibid*

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini lebih difokuskan pada distribusi dana pada kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang Pendidikan di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan permasalahannya antara lain :

1. Bagaimana distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bagaimana distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk menjelaskan distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Pandangan Hukum Islam di Desa



Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

### **G. Signifikasi**

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya.
2. Secara praktis penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H. pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

### **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Peneliti bisa melakukan penulisan tinjauan pustaka untuk menyusun karya ilmiah guna untuk mendapatkan data-data yang relavan dan juga dengan tinjauan pustaka dapat membantu peneliti untuk menghindari plagiasi. Untuk menghindari hal tersebut maka peneliti mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rosidi Azis, dari Universitas Nahdatul Ulama Blitar, Berjudul Pelatihan Pengolahan Nugget Sayuran Meningkatkan Produktivitas Anggota Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Jatinom Blitar. Dalam tulisannya membahas tentang pelatihan pengolahan nugget sayuran meliputi beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi. Kegiatan program pengabdian bisa meningkatkan kualitas keahlian ataupun keterampilan dalam kelompok pendamping anggota PKH di Jatinom untuk mengolah produk nugget sayuran sebagai makanan fast food yang aman bagi kesehatan, strategi desain produk, sehingga dapat meningkatkan produktivitas anggota

kelompok pendamping PKH.<sup>16</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian Rosidi Aziz membahas mengenai pelatihan pengelolaan nugget sayuran meningkatkan produktivitas anggota pendamping keluarga harapan di desa Jatinom Blitar. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang sistem distribusi dana penerima PKH di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Cita Fauziatul Akmala dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana implementasikan PKH dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PKH di Kelurahan Kranggan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cita Fauziatul Akmala menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan yang telah melaksanakan kegiatan yaitu berupa sosialisasi sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kebijakan yang menyusun anggota setiap tingkat kabupaten. Anggaran dan peralatan kegiatan PKH sudah cukup, sumber anggaran tersebut dari dana APBN dan APBD. Dalam penetapan manajemen pelaksana kebijakan adanya koordinator yang bertanggung jawab di setiap kecamatan dan kabupaten. Jadwal kegiatan PKH sudah ditentukan dari Privinsi Jawa Tengah dan harus mengikuti time schedule. Proses validasi data sudah dilakukan sesuai prosedur, memberikan pengarahan dan sosialisasi awal sudah terlaksana, dalam penyaluran dana bantuan sosial terkadang tidak tepat dengan jadwal yang sudah ditentukan dan pendamping PKH selalu melakukan pemuktahiran

---

<sup>16</sup>Rosidi Aziz , “Kebijakan Pengolahan Nugget Sayuran untuk Meningkatkan Produktivitas Anggota Pendamping Keluarga Harapan di Desa Jatinom Blitar”, *Riset dan Konseptual*, Vol. 3 Nomor Universitas Nahdatul Ulama Blitar, 2018.

data disetiap pertemuan.<sup>17</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian Cita Fauziatul Akmala membahas mengenai implementasi PKH di Desa Kranggan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang sistem distribusi dana penerima PKH di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (studi di kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah )” yang ditulis oleh Slamet Riyadi Universitas Lampung, mengemukakan bahwa PKH yang mengkombinasikan skema bantuan tunai dengan prasyarat berupa komitmen kehadiran peserta PKH.<sup>18</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian Slamet Riyadi membahas mengenai analisis implementasi PKH terhadap keluarga sangat miskin. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang sistem distribusi dana penerima PKH di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-Gulik Bandar Lampung” yang ditulis oleh Triwulan Dari Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini menyoroti tentang hasil pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan setelah pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) dilakukan.<sup>19</sup> Yang

---

<sup>17</sup>Cita Fauziatul Akmala, Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, *Skripsi Yogyakarta*, Yogyakarta, 2017.

<sup>18</sup>Slamet Riyadi, Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan, *Tesis (Lampung Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

<sup>19</sup>Triwulan Dari, Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-Gulik Bandar Lampung, *(Lampung: Jurusan Pemikiran*

membedakan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian Tri Wulan Dari membahas mengenai evaluasi pelaksanaan pelayanan PKH di kelurahan Gulak-Gulik Bandar Lampung. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang sistem distribusi dana penerima PKH di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

## **I. Metode Penelitian**

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.<sup>20</sup> Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan data dan penafsiran fakta-fakta.<sup>21</sup> Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Kualitatif studi kasus. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memberi sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui dan juga untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui.<sup>22</sup> Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan nantinya dapat mendukung kesempurnaan penelitian ini, penulis menggunakan metode antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah

---

*Politik Islam*, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>20</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori* (Malang: Rineka Cipta, 2005), h. 16.

<sup>21</sup>Cholid Norobuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), h. 1.

<sup>22</sup>Anselm Straus, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.5.

kehidupan sebenarnya.<sup>23</sup> Guna mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi. Penelitian ini juga menggunakan library research sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relavan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta.<sup>24</sup> Penelitian ini menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu atau kelompok, keadaan, gejala tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar dapat dipahami apa yang terjadi di lapangan.

### 2. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi yaitu berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu, dan anggota populasi itu disebut dengan elemen populasi.<sup>25</sup> Populasi dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 172 peserta PKH yang ada di Desa Karang Anyar sejak Tahun 2020.

#### b. Sampel

Sampel adalah wakil yang dipilih untuk mewakili populasi yang dapat memberikan gambaran keadaan populasi dan memberikan sumber informasi data-data dari

---

<sup>23</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Kencana, 1994), h. 142.

<sup>24</sup>Lexsi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rada Karya, 2001), h. 3.

<sup>25</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 80.

penelitian. Jadi, sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat memberikan gambaran populasinya.<sup>26</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, apabila populasinya lebih dari 100 orang, maka diambil 10-15%, apabila populasinya kurang dari 100 orang maka dijadikan sampel semua. Karena dalam penelitian ini populasinya berjumlah 172, maka sampelnya  $172 \times 10\%$ , sehingga dalam hal ini yang menjadi sampel adalah 17 orang, yang terdiri atas :

1. Penerima bantuan PKH pada tahun 2020
2. Kriteria komponen Pendidikan
3. Memiliki anak yang masih sekolah

Dengan adanya kriteria tersebut, diharapkan dapat digunakan oleh peneliti untuk mengetahui distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan. Metode observasi adalah sebuah metode penelitian yang terencana dan dilakukan dengan secara sistematis pada keadaan ataupun seluruh fenomena sosial dengan gejala-gejala yang mempengaruhi segala aspek, termasuk aspek psikis.<sup>27</sup>

#### b. Interview

Metode wawancara atau interview mencakup cara yang dipergunakan jika seseorang mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan

---

<sup>26</sup>Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosda, 2008), h. 57.

<sup>27</sup>*Ibid*



bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tertentu.<sup>28</sup> Metode ini adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara pencari data dengan informasi atau sumber data tanya jawab yang dilakukan secara sistematis berdasar pada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik pada proses tanya jawab dan masing-masing dari pihak dapat menggunakan metode ini secara wajar dan lancar.<sup>29</sup> Interview dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden, yaitu dengan melakukan interview kepada peserta PKH di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Interview ini digunakan untuk mencapai tujuan dan data yang berkaitan dengan distribusi dan PKH yang ada di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip buku-buu, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat dan agenda-agenda. Data-data tersebut tidak terbatas pada ruang dan waktu.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian ini dengan membaca dan mencatat.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis data adalah sebuah proses mengurutkan data-data yang ada dan mengorganisasikannya sesuai dengan pola dan kategori sesuatu uraian data dasar, sehingga dapat

---

<sup>28</sup>Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 129.

<sup>29</sup>Kartini Kartono, *Metodologi Research Sosial* (Bandung: Kencana, 1997), h. 29.

<sup>30</sup>*Ibid*

ditemukannya sebuah hipotesis kerja dan di sesuaikan dengan data.<sup>31</sup>

a. Penyajian Data

Penyajian data menjadi tahapan dalam menyusun data yang bertujuan untuk penarikan kesimpulan ataupun pengambilan tindakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang disajikan adalah jenis data kualitatif dalam bentuk deskripsi dan narasi.

b. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses pemaknaan atas apa yang dilakukan baik berupa benda, proses, sebab akibat, pola keteraturan, penjelasan sebagai kesimpulan dari penelitian.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan suatu kerangka penelitian ini untuk menindak lanjuti penulisan sebelumnya, penulis membuat sistematika pembahasan yang sederhana, yang di kelompokkan menjadi beberapa setiap Bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan eksplorasi dari semua isi kandungan penelitian ini. Pembagian bab dan sub bab tersebut bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan dan menganalisa data, telaah masalah-masalah dan temuan-temuan yang telah ada, agar lebih mendalam dan komprehensif, sehingga nantinya lebih mudah dipahami.

BAB I, yaitu pendahuluan yang di dalam terangkum seperti penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Menjelaskan tentang landasan teori mengenai Distribusi dan Program Keluarga Harapan (PKH).

---

<sup>31</sup>Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 170.

BAB III, Membahas tentang gambaran umum Desa Karang Anyar dan gambaran umum pelaksanaan PKH yang ada di Desa Karang Anyar.

BAB IV, Berisi tentang inti, yaitu analisis data di lapangan yang dikaitkan dengan teori.

BAB V, Yaitu bab terakhir yang bersisi kesimpulan dan rekomendasi.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Distribusi

##### 1. Pengertian Distribusi

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat.<sup>32</sup> Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak lancar. Sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, distribusi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun suatu negara.<sup>33</sup>

Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik, sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan Konvensional sampai saat ini.<sup>34</sup>

Pertumbuhan Ekonomi yang seharusnya memberi makna sosial, budaya, dan agama malah akan memperlebar

---

114. <sup>32</sup>K. Adi Gunawan, *Kamus Lengkap* (Surabaya: Lima Bintang, 2006), h.

<sup>33</sup>Idri, *Hadis Ekonomi* (Surabaya: Kencana, 2015), h. 128.

<sup>34</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonomisia, 2002), h.216.

jurang antara yang kaya dan yang miskin, dan menggogoti nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Semakin terpusatnya kekuasaan yang semakin hebat di tangan korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah melucuti pemerintah dan kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka kepentingan umum yang lebih luas termasuk berkurangnya penghargaan terhadap kerja produktif yang dilakukan untuk diri sendiri, meskipun bermanfaat bagi kesejahteraan.<sup>35</sup>

Pemerintah dituntut untuk melakukan intervensi guna melakukan terciptanya kondisi yang mendukung mekanisme distribusi dengan adil juga mendorong lahirnya moralitas yang dihiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan dan keadilan.<sup>36</sup>

Proses distribusi tersebut tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hal milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya, lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution/marketing channel*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).<sup>37</sup>

Sistem ekonomi kapitalis sekuler yang membedakan antara kesejahteraan material dengan masalah rohaniyah banyak membawa masalah-masalah dalam distribusi kesejahteraan yang adil dan seimbang di antara masyarakat. Bahwa perlu disadari, kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial dan tidak bisa dipahami terpisah dari nilai-nilai adat, moral, spritual, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu terjadi,

---

<sup>35</sup>David C, *The Post Corporate World* ( Jakarta : Yayasan Obor, 1999), h.95.

<sup>36</sup>Ruslan Abdul, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2002), h.45.

<sup>37</sup>Syed Nawab Halder Naqvi, *Ethics and Economics:An Islamics Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981), h. 87.



sehingga membahas pembangunan ekonomi di Indonesia dengan memasukkan nilai-nilai syariah.

Distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum (*public proverty*) dan kepemilikan pribadi (*privat proverty*), dan meletakkan pada masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memilikinya, serta aturan-aturan tentang warisan, hibah dan wasiat. Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Menurut Afzalur Rahman, yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.<sup>38</sup> Islam tidak boleh memperbolehkan distribusi barang atau jasa yang dilarang seperti, bunga modal, bunga pinjaman yang termasuk riba, hasil pencurian, khamar, bangkai dan sebagainya.<sup>39</sup>

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian integral dari agama Islam, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an.<sup>40</sup> Dengan demikian, sangat jelas bahwa ekonomi Islam terkait dan memiliki hubungan yang erat dengan agama, yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Afzalur Rahman, *Muhammad Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 54.

<sup>39</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fawaidh al-Buntik Hiya al-Riba al-Muharram* (Mesir: Dar Al-Wafa, 1999), h. 80.

<sup>40</sup>Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 317.

<sup>41</sup>Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h.120.

Landasan atau sistem nilai yang membentuk kapitalisme adalah sekulerisme dan materialisme, yang mana sekulerisme berusaha untuk memisahkan ilmu pengetahuan dari agama bahkan mengabaikan dimensi normatif atau moral yang berdampak kepada hilangnya kesakralan koektif yang diperankan agama yang dapat digunakan untuk menjamin penerimaan keputusan ekonomi sosial.<sup>42</sup>

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.

Konsep sistem distribusi Islam perlu dilakukan agar pola pikir terfokus pada tujuan materialistis kepada tujuan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan resiko yang berkeadilan, untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar.<sup>43</sup>

Islam memandang bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan adalah merupakan pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non material (spritual). Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spritual) termasuk didalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar, yang terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan atau tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*three wiill*) dan tanggung jawab (*responsibility*).<sup>44</sup>

Pertama, penekanan Islam terhadap kesatuan / tauhid (*unity*) merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah SWT. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial, karena

---

<sup>42</sup>Iman Indra, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2001), h.23.

<sup>43</sup>Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksekusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h.120.

<sup>44</sup>Syed Nawab, *Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 37.

semua manusi dipandang sama dihadapan Allah SWT. Manusia juga merdeka karena tidak seorang pun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam, sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat.

Kedua, kebebasan (*free will*) yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terkait dengan batasan-batasan yang diberikn Allah, kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (khilafah) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahkan Allah tersebut, ditanamkan melalui aksioma keempat yaitu tanggung jawab (*responsibility*), sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia.

Ketiga, dimensi horizontal Islam yaitu keseimbangan (*equilibrium*) yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau keseimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, diantaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian dalam spektrum hubungan distribus, produksi dan konsumsi dan sebagainya. Prinsip ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstrimitas.

Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distribusi tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan, distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri,

hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan.

Pemerintah berperan aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai wasit atas permainan pasarsaja, tetapi akan berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku pasar yang lain.<sup>45</sup>

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalahm seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelincir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap.<sup>46</sup>

Pemerintah berperan aktif dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai moral dan moral Islam, kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar dan ketiga peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.

---

<sup>45</sup>Adiwaman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2002), h.23.

<sup>46</sup>Anita Rahmawati, Membangun Sistem Distribusi Ekonomi Islam, *Jurnal Addin*, Vol. 2 No. 2, Juli 2010.

Sedangkan mekanisme non ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktifitas melainkan melalui aktifitas non produktif, seperti pemberian hibah, shadaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata.

Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam distribusi pmasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang diatur dalam ajaran Islam. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dan ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional, sebagaimana firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dari orang miskin yang tidak meminta”. (Q.S.Az-zariyat:19).

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab di dalam harta itu terdapat hak masyarakat. Bagi umat Islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan harta ini kepada orang lain, khususnya mereka yang berkekurangan. Dalam ayat lain, Allah berfirman :

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا  
 ٢٦ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِۦ

كُفُورًا ٢٧

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra: 26-27).

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperintah untuk mendistribusikan sebagian dari harta yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan karib kerabat, orang-orang miskin dan para musafir, serta dilarang berlaku boros. Menurut Suhrawardi K. Lubis, seorang Muslim yang mempunyai harta berkewajiban untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang berkekurangan dan untuk kepentingan umum. Sarana pendistribusian ini di dalam agama Islam dikenal dengan istilah zakat, sedekah, infak dan wakaf.<sup>47</sup>

Menurut Islam, kaya atau tidaknya seseorang tidak semata-mata berasal dari jerih payah dan usahanya dalam mencari dan mengumpulkan harta. Allah-lah sesungguhnya yang menentukan mereka menjadi kaya atau tidak. Karena itu, pada dasarnya harta yang dimiliki manusia itu milik Allah yang titipkan kepadanya. Manusia bukanlah pemilik mutlak harta tersebut sehingga tidak bisa menggunakan seenaknya

<sup>47</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Kencana, 2015), h. 25.



sendiri. Karena sifatnya titipan, maka ada aturan-aturan yang harus diikuti yang dibuat oleh penitipnya, yakni Allah. Adanya perbedaan antara kaya dan miskin itu dimaksudkan agar terjadi sinergitas di antara mereka karena saling membantu dan membutuhkan. Allah berfirman :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَحْنٌ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُدْحًا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan mereka, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zakhrif: 32).

## 2. Tujuan Distribusi

Sebagaimana produksi dan konsumsi, distribusi juga mempunyai tujuan. Di antara tujuan distribusi antara lain :

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian. Manusia harus terus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan

dan tidak berlebihan. Mereka jga harus mendistribusikan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan ini.<sup>48</sup>

- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Meskipun demikian, Islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar-individu dalam masyarakat. Karena itu, ada yang kaya dan ada pula yang miskin, tetapi jurang pembeda di antara mereka tidak boleh terlalu lebar sehingga mengakibatkan disintegrasi sosial.<sup>49</sup> Allah berfirman :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

Artinya : “Harta rampasan *fa'i* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukum-Nya”. (Q.S Al-Hasyr : 7)

<sup>48</sup>Idri, *Hadis Ekonomi* (Surabaya: Kencana, 2015), h. 147

<sup>49</sup>*Ibid*

- c. Untuk mensucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Kotoran ini dapat berupa sifat kikir, tamak, rakus, boroe, dan sebagainya. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia, jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.<sup>50</sup>
- d. Untuk membangun generasi yang unggul generasi yang unggul karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa. Dengan ekonomi yang mapan, suatu bangsa dapat membentuk generasi yang unggul. Islam mengajarkan agar umatnya meninggalkan generasi yang kuat dari segi fisik, cerdas dari segi otak, profesional dari segi kerja dan karya serta unggul dari segi ilmu.
- e. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spritual dan ekonomi. Dari segi spritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
- f. Untuk terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas di dalam masyarakat Muslim, terbentuknya ikatan kasih sayang di antara individu dan kelompok dalam masyarakat, terkikisnya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang dapat berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Idri, *Hadis Ekonomi* (Surabaya: Kencana, 2015), h. 149

<sup>51</sup>*Ibid*

### 3. Kriteria Distribusi

Adapun kriteria-kriteria yang mendukung terwujudnya distribusi dalam aktivitas ekonomi sebuah negara. Kriteria-kriteria yang mendukung terwujudnya distribusi tersebut (sebagaimana yang dikemukakan oleh Anas Zarga) meliputi :<sup>52</sup>

- a. Pertukaran, kriteria ini lebih mengacu pada konsep dimana orang berhak mengeluarkan pendapatannya untuk didistribusikan kepada orang lain. Sehingga implikasi yang mengemuka kemudian ialah adanya fondasi yang solid dalam menunjang terbentuknya kemanusiaan yang adil.
- b. Kekuasaan atau negara dengan lebih merujuk pada prinsip ini, bagaimana peran kekuasaan atau negara turut mewarnai pendistribusian “kekayaan negara” secara lebih “merata”.
- c. Kebutuhan, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, lebih pada nilai “keadilan” dimana pendistribusian tersebut haruslah disesuaikan dengan “tingkat” kebutuhan masing-masing individu.

### 4. Prinsip-Prinsip Distribusi

Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar dari proses distribusi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi antara lain :

- a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan untuk memenuhi batas minimal pembatasan riil, yaitu had *al-kifayah* bagi setiap orang. Islam tidak bertujuan pada

---

<sup>52</sup>Madnasir “*Distribusi Dalam Islam*”, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 30.

terjadinya pendistribusian yang berimbang, boleh saja terjadi selisih kekayaan dan pendapatan setelah terpenuhinya had *al-kifayah*. Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran kebutuhan yang dapat menggerakkan orang untuk bekerja.<sup>53</sup>

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud. *Pertama*, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan dan warna kulit. *Kedua*, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. *Ketiga*, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.<sup>54</sup>

#### b. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim. Rasa persaudaraan harus ditanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi.<sup>55</sup>

Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Allah memerintah agar umat Islam senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-cerai, sebagaimana firman-Nya :

---

<sup>53</sup>Idri, *Hadis Ekonomi* (Surabaya: Kencana, 2015), h. 150

<sup>54</sup>*Ibid*, h.151

<sup>55</sup>*Ibid*, h.152

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
 عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا  
 وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
 لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-cerai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”. (Q.S 3/Al-Imran : 103).

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non-Muslim. Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapa pun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

#### c. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan



menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain.<sup>56</sup>

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar. *Pertama*, sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah. *Kedua*, adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya. *Ketiga*, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. *Keempat*, Adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain. *Kelima*, Umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial. *Keenam*, Larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang (*riya*).<sup>57</sup>

#### d. Prinsip Larangan Riba dan Gharar

Pelarangan riba merupakan permasalahan penting dalam ekonomi Islam, terutama dikarenakan riba secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an (*riba an-nasi'ah*).<sup>58</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا  
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

<sup>56</sup>Idri, *Hadis Ekonomi* (Surabaya: Kencana, 2015), h. 153.

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 154.

<sup>58</sup>Ahim Abdurahim, *Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h.276.

## B. Program Keluarga Harapan (PKH)

### 1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penangan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan atau seseorang miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>59</sup>

Penyaluran bantuan sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan atau seseorang miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.<sup>60</sup> Bank penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial PKH.

### 2. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Hak Keluarga Penerima Manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain :<sup>61</sup>

- a. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Pendampingan PKH.
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

---

<sup>59</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1.

<sup>60</sup>Ibid, h. 4.

<sup>61</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 6.

- d. Program bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain :<sup>62</sup>

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil / menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan / penyandang distabilitas berat.

### 3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan Program Keluarga Harapan antara lain :<sup>63</sup>

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

---

<sup>62</sup>Ibid, h . 7.

<sup>63</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 2.

#### 4. Kriteria Program Keluarga Harapan (PKH)

Kriteria-kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain :<sup>64</sup>

- a. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :
  - a). Ibu hamil atau menyusui.
  - b). Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :
  - a). Anak sekolah dasar atau madrasah atau sederajat.
  - b). Anak sekolah menengah pertama atau madrasah atau sederajat.
  - c). Anak sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sederajat.
  - d). Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- d. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :
  - a). Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun.
  - b). Penyandang disabilitas diutamakan penyandang distabilitas berat.

Kriteria-kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu antara lain :<sup>65</sup>

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per orang.

---

<sup>64</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5.

<sup>65</sup>Kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS)“(On-line), tersedia di: <https://juraganberdesa.blogspot.com/2018/01/kriteria-miskin-menurut-standar-bps.html> (5 Desember 2020).

- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari bambu atau rumbia (kayu).
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000.00 perbulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah / tidak tamat SD / tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000.00 seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, perak, atau barang modal lainnya.

## 5. Mekanisme Pelaksanaan PKH

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan antara lain :<sup>66</sup>

- a. Perencanaan
  - b. Penetapan calon Program Keluarga Harapan (PKH)
  - c. Validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
  - d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
  - e. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
  - f. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH).
  - g. Peningkatan kemampuan keluarga.
  - h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
  - i. Pemuktakhiran data keluarga penerima manfaat PKH.
  - j. Transformasi kepesertaan PKH.
- ## 6. Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

Mekanisme penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain :<sup>67</sup>

1. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Sosialisasi dan edukasi.
3. Distribusi kartu keluarga sejahtera.
4. Proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

---

<sup>66</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 32.

<sup>67</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 40.

5. Penarikan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
7. Kelembagaan Program Keluarga Harapan

Kelembagaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain :<sup>68</sup>

1. Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) dibentuk tim koordinasi nasional Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Tim koordinasi nasional Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, distabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian / lembaga yang terkait.
3. Tim koordinasi nasional Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan menteri.
4. Susunan keanggotaan tim koordinasi nasional Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana pada ayat (3) diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
8. Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH
  1. Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan

---

<sup>68</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 22.



fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5.

2. Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dalam pasal 34.
  3. Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat 1 dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.
  4. Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pendamping sosial.
  5. Dalam hal pelaksanaan validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat (PKH).
  6. Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.<sup>69</sup>
9. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH
1. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan hasil verifikasi komitmen atau pemuktahiran data.

---

<sup>69</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 35.

2. Penetapan Keluarga Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.<sup>70</sup>

#### 10. Pemuktahiran Data Keluarga Penerima Manfaat (PKH)

1. Pemuktahiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf i dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh dan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
2. Kegiatan pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data.
3. Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam melakukan kegiatan pemuktahiran data melalui sistem informasi manajemen PKH.<sup>71</sup>




---

<sup>70</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 36

<sup>71</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 52.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-qur'an**

Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Ponogoro, 2005)

### **Buku**

Abdurrahman , *Politik Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007)

Adiwaman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2002)

Afzalur Rahman, *Ekonomi Islami* (Yogyakarta:Darma BaKTI Wakaf,1985)

Ahim Abdurahim, *Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016)

Anselm Straus, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015)

David C, *The Post Corporate World* ( Jakarta : Yayasan Obor, 1999).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT, Gramedia Pustaka Umum, 2011)

H.Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah : Persepektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana,2012)

Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003).

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonomisia, 2002).

Hermanita, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press, 2013).

Idri, *Hadis Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi* (Depok: Kencana, Edisi Pertama, 2015)

Iman Indra, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2001)

Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, Cetakan Pertama, 2015)

K. Adi Gunawan, *Kamus Lengkap* (Surabaya: Lima Bintang, 2006),

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001)

Kartini Kartono, *Metodologi Research Social*, (Bandung: Alumi Bandung, 1997)

Madnasir “*Distribusi Dalam Islam*”, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997)

Morissan, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012).

Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksekusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007)

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*, (Malang: Rineka Cipta, 2005)

Oos M. Anvas, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Rozalinda, *Ekonomi Islam “Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet: ke-2, 2015)

Ruslan Abdul, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2002)

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Kencana, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Kencana, 1994)

Syed Nawab Halder Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981)

Yusuf Al-Qardhawi, *Fawaidh al-Buntik Hiya al-Riba al-Muharram* (Mesir: Dar Al-Wafa, 1999)

#### **Jurnal**

Anita Rahmawati, *Membangun Sistem Distribusi Ekonomi Islam*, *Jurnal Addin*, Vol. 2 No. 2, Juli 2010.

Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016.

Rosidi Azis, “Kebijakan Pengolahan Nugget Sayuran untuk Meningkatkan Produktivitas Anggota Pendamping Keluarga Harapan di Desa Jatinom Blitar”, *Riset dan Konseptual*, Vol. 3 Nomor Universitas Nahdatul Ulama Blitar, 2018.

Cita Fauziatul Akmal, Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, *Skripsi Yogyakarta*, Yogyakarta, 2017.

Slamet Riyadi, Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan, *Tesis (Lampung Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Triwulan Dari, Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-Gulik Bandar Lampung, (*Lampung; Jurusan Pemikiran Politik Islam*, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

### **Online**

Kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) (Online), tersedia di:  
<https://juraganberdesa.blogspot.com/2018/01/kriteria-miskin-menurut-standar-bps.html> (5 Desember 2020)

### **Wawancara**

Ibu Idah, Pendamping PKH, Wawancara Pribadi, Karang Anyar, 29 November 2020.

Bapak Wagiman, RT Desa Karang Anyar, Wawancara Pribadi, Karang Anyar, 29 November 2020.

Ibu Rusida, Peserta PKH, Wawancara Pribadi, Karang Anyar, 30 November 2020.

Ibu Ponem, Peserta PKH, Wawancara Pribadi, Karang Anyar, 30 November 2020.

Ibu Erna, Peserta PKH, Wawancara Pribadi, Karang Anyar, 1 Desember 2020.

Ibu Yani, Peserta PKH, Wawancara Pribadi, Karang Anyar, 1 Desember 2020.

Ibu Sulastri, Peserta PKH, Wawancara Pribadi, Karang Anyar, 2 Desember 2020.

Ibu Sumiah, Peserta PKH, Wawancara Pribadi, Karang Anyar, 3 Desember 2020.

Ibu Sutirah, Peserta PKH, Wawancara Pribadi, Karang Anyar, 4 Desember 2020.

Ibu Liani, Peserta PKH, Wawancara Pribadi, Karang Anyar, 4 Desember 2020.

Ibu Tukirah, Peserta PKH, Wawancara Pribadi, Karang Anyar, 5 Desember 2020.

Ibu Sella, Peserta PKH, Wawancara Pribadi, Karang Anyar, 6 Desember 2020.